**IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH KOTA PALEMBANG DI KECAMATAN SEBERANG ULU I**

PEGI OLIVIA VIOLETA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

peggyvioleta@ymail.com

**ABSTRAK**

Penelitian berjudul “Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang di Kecamatan Seberang Ulu I” dilatarbekangi oleh keadaan Kecamatan Seberang Ulu I yang masih menjadi kecamatan terkumuh, letaknya yang berdekatan langsung dengan Sungai Musi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari strategi yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang untuk Kecamatan Seberang Ulu I, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan apa saja upaya yang telah dilakukan.Penelitian menggunakan teori Hunger dan Wheelen dengan indikator berupa program, anggaran dan prosedur atas implementasi strategi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data berupa triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Palembang secara implementasi keseluruhan pada program, anggaran dan prosedur sudah berjalan baik namun masih kurang optimal sebab melihat masih luasnya kawasan kumuh. Perlu adanya perhatian pada ketepatan waktu terbitnya juknis dan mencari solusi keterbatasan penganggaran dana khususnya di Kecamatan Seberang Ulu I. Kecamatan ini juga menemui pekerjaan rumah pada peningkatan pola pikir masyarakatnya untuk mendukung berjalannya segala upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Palembang.

**Kata kunci:** Implementasi strategi, penanganan kawasan kumuh

***ABSTRACT***

 *A research entitled “The Implementation of Palembang’s Slums Upgrading Strategic in Seberang Ulu I” has motivated by the high number of slums level in Seberang Ulu I Sub-district due to its located adjacent of Musi’s riverside. This research purposed to analyze how the implementation of slums upgrading strategic done then finding out what’s the influencing factor on implementation slums upgrading strategic by public housing and neighborhood department. Then to know what the effort that has done. This research using Hunger and Wheelen’s Theory with the indicators are programs, budgets, and procedures. Research methods applying qualitative descriptive with inductive approach. As the technique of data and information gathering is done with observation, interview and documentation. Meanwhile data analyzing technique done with triangulation technique. Base on the result of the research, the implementation of Palembang’s slum upgrading strategic in Seberang Ulu I Sub-district of overall show a good issue but needs to be improved. Based on the indicator are programs, budgets, and procedures it has running well but need an improvement, considering of number slum in this sub-district still in a huge number. An attention needed to be paid at the timeliness of publication of technical guidelines, then it needs a solution of limited founding, and still having a big homework to improve the mindset of the community in this sub-district as an effort to support what’s the government has done.*

***Keyword****: Implementation, Slums upgrading*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

 Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Selatan berjumlah 1.602.071 jiwa. Sumsel menjadi provinsi terkaya kelima namun menjadi daerah termiskin ke sepuluh di Indonesia.[[1]](#footnote-1) Mengingat betapa pesatnya pembangunan infrastruktur penunjang dalam menghadapi banyak *event* besar skala nasional maupun internasional olahraga, mulai dari PON pada 2004 hingga *Asian Games* pada 2018 di Palembang. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat ibu kota negara menjadi alasan bertambahan tingginya laju urbanisasi baik masyarakat dari desa ke kota maupun dari kota lain ke Kota Palembang.

Kondisi Kota Palembang yang terbagi menjadi dua wilayah yang terpisah oleh Sungai Musi yaitu wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Sungai Musi yang terbentang di tengah kota menjadi nadi dari kehidupan dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat mulai dari pedagangan, lajur lalu lintas air, sumber air, pengairan, pariwisata, bahkan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal baik dengan kondisi bangunan di sekitaran sungai, di bantaran, maupun diatas sungai ditambah permasalahan dengan adanya tingginya laju urbaniasi di Kota Palembang yang tidak dibarengi dengan penyediaan lahan pekerjaan menyebabkan munculnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kota Palembang. Masyarakat MBR berdominasi tinggal di bantaran sungai dengan kondisi rumah-rumah pinggir Sungai Musi berbentuk rumah rakit, rumah yang dibangun dengan bahan kayu, beratap seng dan berada di atas permukaan sungai menjamur di sepanjang bantaran sungai, rumah-rumah rakit di bantaran sungai biasanya tidak memiliki jamban komunal yang dibangun di atas sungai ataupun di sekitar bantaran sehingga menciptakan pemukiman yang terbilang kumuh di kawasan sungai karena masyarakat yang tinggal membuang sampah dan beraktivitas MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) langsung ke sungai.

Peraturan Walikota Kota Palembang nomor 489 Tahun 2014 revisi tahun 2018 menyatakan masih terdapat 59 titik kawasan kumuh di Kota Palembang namun yang menjadi fokus utama pemerintah adalah kecamatan yang berlokasi dekat dengan sungai. Pemerintah Daearah telah melakukan upaya penanganan dengan merumuskan strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh dalam RPJMD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang dengan memprioritaskan penanganan kawasan pemukiman kumuh di bantaran Sungai Musi. Asisten Daerah II Kota Palembang mengatakan “Kecamatan Kertapati memang di titik beratkan sebagai peringkat pertama kecamatan terkumuh, namun karena letaknya yang saat dekat dengan pusat kota ditambah jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tertinggi, Keenam wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I terletak di sepanjang bantaran sungai musi dan terkategori dalam kumuh berat Kecamatan Seberang Ulu I dinilai menjadi kecamatan terkumuh yang diprioritaskan. Sulit untuk keenam kelurahan tersebut mengkoordinasikan penanganan kawasan kumuh sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang harus mengintegrasikan kembali bagaimana implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh yang telah dibuat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

**TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai ialah untuk mengetahui bagaimana dan sejauhmana implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang dilaksanakan, faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya pengimplementasian strategi tersebut dan apa saja upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah dalam penelitian ini dirumuskan dengan bagaimana implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang dilaksanakan, faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang dan upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang dalam mengatasi faktor penghambat.

**METODE PENELITIAN**

Penelitan dengan judul Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang di Kecamatan Seberang Ulu I menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif.

**SUMBER DATA**

 Penelitian Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang di Kecamatan Seberang Ulu I mendapatkan data berdasarkan sumber berupa *person*  Kepala Dinas, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kumuh (PRKP) Kota Palembang, Camat dan pegawai kecamatan Seberang Ulu I, Lurah, LKM dan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I. *Place* Dinas PRKP dan Kecamatan Seberang Ulu I. *Paper* yaitu data yang didapatkan dari dinas, kecamatan dan LKM.

**TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

1. Wawancara (*Interview)*
2. Observasi
3. Studi pustaka (*Library Research)*

**TEKNIK ANALISIS DATA**

Berdasarkan pendapat Miles dan Huber (2009:19) penelitian kualitatif dianalisis dengan cara:

1. *Data reduction* (Reduksi data)
2. *Data Display* (Penyajian data)
3. *Conclusion drawing/verification*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Target berdasarkan strategi dinas PRKP untuk melakukan penurunan luasan kawasan pemukiman kumuh di Kota Palembang seharusnya telah menurun mencapai luas target 0% kawasan kumuh pada akhir tahun 2018, namun kenyataannya hingga 2019 masih terdapat 1729,84 Ha kawasan kumuh di Kota Palembang. Target baru 2019 ialah penurunan luas pemukiman kumuh sebesar 507,47 Ha atau sebesar 25% pertahunnya hingga benar-benar menyentuh 0% di tahun 2020. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang telah menyusun strategi penangan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang yang dimuat dalam renstra Dinas PRKP tahun 2013-2018 yaitu:

1. Prioritas pada peningkatan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat dan layanan infrastruktur sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimum) serta perbaikan kualitas rumah kumuh;
2. Perhatian khusus dalam rangka mengurangi tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan dan perbaikan kualitas rumah kumuh;
3. Peningkatan layanan infrastruktur sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan perbaikan kualitas rumah kumuh serta peningkatan penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh;
4. Peningkatan taraf penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh dan perbaikan kualitas rumah kumuh;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan kumuh dalam rangka meningkatakan layanan infrastruktur sesuai SPM; dan
6. Rencana tindak pencegahan melalui pengawasan, pengendalian atas kesesuaian fungsi pemukiman dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan *mainstreaming* keenam strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh terbentuklah sebuah konsep pembangunan dan penataan kawasan kumuh pemerintah daerah yaitu melalui inisiasi walikota untuk memberikan kesempatan pada tukang becak, tukang kelontong, dan tukang kerja serabutan lainnya agar bisa memiliki impian memiliki rumah layak huni. Solusi-solusi yang ditawarkan pada bidang informal melalui bantuan bank berupa:

1. Penataan kawasan kumuh di pinggiran Sungai Musi dengan membangun Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
2. Ganti rugi lahan setiap tahun di kawasan Kumuh untuk membangun perumahan MBR;
3. Bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan PU-PERA, bedah rumah 1000 unit/tahun dalam 5 tahun;
4. Pembangunan sarana umum jalan lingkungan di Perumahan MBR;
5. Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Mewah);
6. Program P2KP (Program Proyek Penganggulangan Kemiskinan di Perkotaan); dan
7. Program NUSP *(Neightborhood Upgrading Shelter Project)* proyek penanganan kawasan kumuh oleh Kementerian PU-PERA.

Berdasarkan permasalahan dan strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang, teori yang digunakan dalam menganalisis Implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kota Palembang yaitu teori Hunger and Wheelen dimana menjelaskan implementasi strategi ialah proses organisasi mewujudkan strategi dan kebijakannya yang telah disepakati dalam tindakan melalui pengembangan keberhasilan kebijakan dengan memenuhi indikator-indikator keberhasilan pada tiga bagian yaitu program-program dijalankan dengan proses kerja sebuah kebijakan (dilihat pada prosedurnya) dijalankan sesuai aturan yang berlaku atau tidak, dan yang terakhir, penyerapan anggaran secara maksimal pada tempat yang benar artinya tidak disalahgunakan.

**Program**

Program dan kegiatan yang telah disetujui dan disusun skala prioritas wilayah penanganan lalu dibebankan kepada Dinas PRKP, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

 a. Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (MBR);

 b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan:

a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan

a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat.

4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, dengan kegiatan :

a. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.

5. Program pengelolaan areal pemakaman;

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan :

a. Pemeliharaan RTH; dan

b. Pengembangan taman rekreasi

7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,dengan kegiatan:

a. Perencanaan pengembangan infrastruktur; dan

b. Pembangunan/peningkatan infrastruktur.

8. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan :

1. Program penerangan Jalan dan utilitas;
2. Program pelayanan administrasi perkantoran;
3. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
4. Program peningkatan disiplin aparatur
5. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan kegiatan; dan
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7. **Program membuat prioritas dan dampak yang berkaitan dengan visi misi dan strategi laksanakan.**

Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa program yang telah ada seperti program bedah rumah, NUSP, dan Sanimas yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I benar-benar dibuat berdasarkan tingkat urgensi dan tingkat prioritas yang dilihat di lapangan, dan harus dilakukan studi lapangan terlebih dahulu berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan dan mendatangkan manfaat dan keefektifan program di berikan dalam menangani permasalahan pemukiman kumuh Kota Palembang teruma di Kecamatan Seberang Ulu I.

1. **Tingkat keterkaitan program dengan visi, misi, dan strategi**

Penyusunan program telah memiliki terterkaitan dengan visi-misi dinas dan visi-misi kota serta telah memperhatikan rincian-rincian hubungan antara visi, misi dan strategi yang telah dibuat oleh dinas sebelumnya.

1. **Koordinasi Program**

Koordinasi dalam pengimplementasian sebuah strategi sangat diperlukan. Tujuannya agar tidak terjadi salah komunikasi atas apa tujuan utama dari pengimplementasian strategi. berdasarkan observasi dan hasil studi pustaka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang telah melakukan koordinasi secara baik secara vertikal dan juga horizontal. Antara lain koordinasi horizontal yang dimaksud adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang bersama dengan 1) Bappeda Kota Palembang 2) SKPD lain Kota Palembang seperti Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tatat Kota dan yang lain dalam hal implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh 3) Kecamatan 4) Kelurahan 5) Masyarakat 6) Pihak swasta yang bermitra.

1. **Penyusunan program yang sederhana**

Yang dimaksudkan dengan program yang dibuat dengan sederhana yaitu program dibuat menyesuaikan keadaan sesungguhnya dan benar-benar program yang dibutuhkan di kawasan Seberang Ulu I, sehingga program dinilai efektif dan efisien tepat sasaran dan tidak muluk-muluk namun mencapai hasil yang maksimal. program-program yang ditetapkan dan dalam pengimplementasiaannya telah memenuhi syarat program yang sederhana dengan tujuan efisien dan efektif dalam penanganan kawasan kumuh. Artinya program dibuat memang banar-benar harus tepat sasaran dan bukan program yang asal-asalan diadakan.

1. **Kontribusi setiap unit mengajukan program**

 Program telah dilaksanakan dengan melibatkan setiap elemen pendukung program. Mulai dari pihak tertinggi yaitu pemerintah daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada tiap unit-unit kerjanya telah memberikan kontribusi masing-masing sesuai dengan bingkai tupoksinya. Selain itu, pengimplementasian program ini juga dilakukan hingga dasar sampai ke kecamatan dan ke kelurahan serta LKM-LKM yang terkait telah memberikan kontribusi.

1. **Program yang *sustainable***

program telah memperhatikan keberlanjutan program dapat dilaksanakan dalam jangka panjang, dan memberikan manfaat jangka panjang namun data masih belum ter*update* secara berkala.

**Anggaran**

 Pada tahun 2018 anggaran yang dianggarkan khusus untuk program NUSP (Neighborhood Uprgading Shelter Program) periode II untuk Kota Palembang sebesar Rp. 11.225.999.166 (sebelas koma dua milyar). Dana untuk Seberang Ulu I sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dengan rincian penggunaan perbaikan sarana dan fasilitas seperti drainase, pengecoran jalan dan pipa, pengadaan motor sampah. Pada tahun 2018 tidak dianggarkan dana rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi kecamatan Seberang Ulu I, sebab telah dilaksanakan pada tahun 2017. Prioritas Dinas PRKP pada tahun 2018 pada kecamatan Seberang Ulu II, Kertapati dan Plaju. Namun kawasan-kawasan prioritas ini masih termasuk daerah seberang ulu. Berdasarkan data TNP2K di Kota Palembang masih terdapat 5.251 unit RTLH. Dan masih 2.249 unit RTLH yang harus ditangani di 106 Kelurahan Kota Palembang di tahun 2018 menuju Palembang Emas Bebas Kumuh 2020.

1. **Dinyatakan dalam satuan moneter**

Berdasarkan studi pustaka segala bentuk laporan dan pertanggung jawaban yang mengenai keuangan telah dibuat dalam bentuk satuan moneter dan dalam bentuk yang efisien.

1. **Kurun waktu batas rencana kerja**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara mengenai perencanaan anggaran di Dinas PRKP telah dibuat dalam jangka waktu satu tahun dan diuat telah berdasarkan APBD dan APBN, dan terus diperbaharui setiap tahunnya.

1. **Mengandung komitmen manejemen**

Komitmen dalam pengelolaan keuangan sudah dimulai sejak tahapan perencanaan, karena yang berkaitan dengan keuangan sangat sensitiif sehingga harus ada sesuatu yang mengikat.

1. **Melalui persetujuan pejabat tinggi**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan pengelolaan anggaran di Dinas PRKP sudah memenuhi indikator harus dengan persetujuan pejabat tinggi. Sehingga sistem anggaran dapat dengan mudah diawasi dan di kontrol.

1. **Analisis terjadinya penyebab penyimpangan**

Telah terdapat sistem yang mengawasi penyalahgunaan anggaran maupun terjadinya penyimpangan Dinas PRKP telah memiliki bagiannya sendiri dibantu dengan sebuah SIMDA.

**Prosedur**

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus menggambarkan semua aktivitas manajemen yang akan dilaksanakan agar petugas atau pegawai dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dalam organisasi atau unit kerja. Standar Operasional Prosedur memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait dan dapat melindungi organisasi/unit kerja atau pegawai dari kesalahan administrasi.

1. **Menggambarkan aktivitas manejemen**

Dinas PRKP telah memuat program dijalankan sesuai dengan alur SOP yang menggambarkan sebuah kegiatan manejemen. Manejemen sendiri memuat perencaan, pengorganisasian, aktualisasi dan dan pengawasan terhadap elemen organisasi. Dapat dilihat juga pada gambar bagan SOTK dinas dan gambar organisasi pelaksana penananganan kawasan kumuh yang dimuali dari pusat hingga daerah dan sampai lini terkecil yang berada di tiap kelurahan dan LKM kelurahan

1. **Sumberdaya yang melakukan aktivitas**

Dinas PRKP sudah dinilai sesuai dengan kriteria terberdaya dan memiliki jalur linier yang sama dengan bidang yang dihadapi. Rata-rata pegawai yang ada di dinas PRKP mulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah pekerja lapangan menguasai dunia teknik, yang sangat erat kaitannya dengan dinas PRKP, yaitu teknik pemetaan lahan, pemetaan kawasan dan pembangunan infrastruktur dalam hal ini di kawasan pemukiman kumuh.

1. **Dokumentasi aktivitas**

Dinas PRKP telah memuat dokumentasi terhadap aktivitas implementasi program yang dilaksanakan. Dokumentasi bertujuan sebagai barang bukti atas pelaksanaan aktivitas perwujudan dari program, bentuk pertanggung jawaban yang bisa digunakan dalam laporan kegiatan dan dapat juga digunakan sebagai bahan referensi untuk melihat perkembangan pelaksaan dari kegiatan program.

1. **Instruksi kerja sebagai referensi**

Instruksi kerja telah dilaksanakan, namun sering terjadi hambatan saat lambatnya distribusi juknis dari pusat ke daerah. Hal ini sering menghambat pelaksanaan program yang membutuhkan program yang bersifat penting untuk dilaksanakan segera mengingat target penanganan kawasan pemukiman kumuh harus segera di laksanakan 100%.

**FAKTOR PENGHAMBAT**

1. **Masyarakat**

masyarakat yang berada di kawasan Kecamatan Seberang Ulu I mengalami kendala perbedaan kultutral antara masyarakat darat dan laut. Sehingga pada pelaksanaan strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh di kecamatan Seberang Ulu I menemui hambatan yaitu sedikit sulit dilakukan jika tanpa ada partisipasi dari masyarakatnya untuk menyadari pentingnya perbaikan pada pemukiman yang mereka tempati sekarang. Contohnya, telah ada program gotong-royong yang seharusnya sudah menggerakan masyarakat dengan sendirinya untuk menyadari membersihkan lingkungannya untuk kebaikannya mereka sendiri.

1. **Dana/anggaran**

dana yang dikucurkan untuk dinas PRKP ini terbatas padahal luas kawasan kumuh di Kota Palembang masih terdapat 59 titik dan berdasarkan SK Walikota Palembang wilayah kumuh masih terbilang sangat luas. Pengimplementasian strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh terutama di Kecamatan SU I tidak bisa langsung secara menyeluruh dan serentak dilaksanakan karena melihat jumlahnya yang luas, dan permasalah yang beragam contohnya di Kecamatan Seberang Ulu I sehingga harus membagi-bagi dana untuk prioritas penangan setiap tahunnya. Jadi dapat disimpulkan sulit untuk Kota Palembang mewujudkan bebas kumuh dalam waktu dekat atau di tahun 2020.

1. **Prosedur dan teknologi**

secara prosedural pendataan telah dilakukan oleh staff bidang perumahan serta LKM ke lapangan namun hanya melalui ketua RT setempat. Dinas PRKP belum menerima keluhan dari masyarakat secara langsung hingga ke sumber dasar karena terkendala proses kritik dan saran dari masing-masing masyarakat harus melalui prosedur.

**FAKTOR PENDUKUNG**

1. **Dukungan dari instansi lain**

Dalam mengatasi permasalahan kumuh, dinas PRKP tidak hanya melakukan upaya penanganan sendiri. Pemukiman kumuh sendiri memiliki kerjasama linier di bidang lain misalnya kesehatan lingkungan, tata ruang, peningkatan keswadayaan dan penelitian dari bidang akademisi dan lainnya

1. **Letak wilayah yang strategis**

Kecamatan Seberang Ulu I berdekatan langsung dengan pusat kota berjarak kurang lebih 3 Kilometer dari Jembatan Ampera. Letaknya juga berdekatan bahkan dialiri sungai di sepanjang wilayah kecamatan hal ini bisa dimanfaatkan di sektor pariwisata sungai sebagaimana tercantum dalam RPJMD kota Palembang tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas pemukiman pinggiran sungai menjadi kawasan dengan daya tarik wisata air/ *waterfront city.*

**UPAYA MENGATASI HAMBATAN**

Dinas telah melakukan upaya dengan menunjuk orang-orang yang dituakan sebagai tokoh LKM, guna dapat menberdayakan dan merangkul masyarakat namun dalam hal lainnya Dinas PRKP hanya dapat mengerjakan apa yang menjadi tupoksinya saja, selebihnya merupakan upaya yang diinisiasi secara pribadi oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dalam mengatasi hambatan dana/anggaran Dinas PRKP hanya melalukan tugas dan menginisiatif sebagaimana tupoksinya dan kegiatan yang dilakukan tidak melenceng dari topoksi, diluar itu merupakan inisiasi pribadi dari anggota dinas maupun masyarakat. Pada era milenials teknologi telah menjadi kebutuhan, namun dalam pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh di dinas PRKP masih belum optimal menggunakan teknologi, padahal dengan adanya teknologi dapat membuat segala pekerjaan menjadi lebih mudah dan hal ini berimbas pada kurang optimalnya kinerja dinas. Penggunaan teknologi hanya digunakan pada aspek komunikasi, padahal bisa memanfaatkan *website* sebagai tempat delik pengaduan langsung dari masyarakat sehingga aspirasi, keluhan dan saran dari masyarakat dapat segera ditampung oleh dinas untuk segera ditindak lanjuti. Dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh di Dinas PRKP ini sering mengalami keterlambatan pelaksaan diakibatkan prosedur yang masih belum efisien dan terlambatnya pengadaan juknis dari pusat.

**KESIMPULAN**

Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang sudah berjalan sesuai dengan indikator implementasi yang disebutkan oleh Hunger and Wheelen namun dirasa masih kurang efektif dan efisien karena seringnya terjadi hambatan kerja karena lambatnya proses penyebaran petunjuk teknis di lapangan sehingga sering membuat pekerja lapangan kebingungan memberikan instruksi secara verbal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang.*

Cresswell,John W. 2014 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches 4th Edition*. London: Sage Publications

David*,* R Fred. 2012. *Strategic Management Concepts & Cases.* Pearson. Academic; 14th edition*.*

George R. Terry. 2009. *Prinsip-prinsip Menejemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2012. *Manajemen Strategis Edisi/Cetakan II.* Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm.17

John W Cresswell. 2007. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches,* Edisi keempat, Singapore University Of Nebraska-lincoln

Kamus Tata Ruang, Dinas PU DAN IAP

Kumar,Rajit. 2011. *Research Methodology: A Step By Step Guide For Begginers*. London: Sage Publication

Kuswartojo, Tjuk. 2010*. Pemukiman dan Perkotaan, Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Pemukiman.* ITB:Bandung

Lexy Maleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.

Rindarjono, gamal Mohammad.2012. *SLUM Kajian Pemukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial.* Yogyakarta: Media Perkasa.

Rudiantoro dan Siregar. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP.SNA*.Banda Aceh: 21-22 Juli.

Sastra M. suparno. *2006.*  *Buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan. Yogyakarta:ANDI.*

Sugiyono. Sugiyono.2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabetha.

Syafri*,* Wirman *dan* Israwan*,* Setyoko*. 2008. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja.* Bandung: Alqa Print Jatinangor.

Tachjan.2008. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung.

Winarno, Budi. 2008*. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta:* Media Pressindo.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang- Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2016

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Dirjen Cipta Karya Nomor 40 2016

1. **Sumber-sumber Lain**

Data Susenas BPS 2016

Data BPS dikutip dalam laporan Sosial Ekonomi Januari 2016

Data BPS Kota Palembang dalam angka tahun 2016

<https://Kontan.co.id/news/Menteri-ppn-tingkat-kemiskinan-saat-ini-terendah-sepanjang-masa>. kamis 19 Juli 2018 (diakses 19 September 2018)

<http://www.rmolsumsel.com/read/2016/01/19/43890/Seberang-Ulu-Tetap-Dominasi-Pelangganberpenghasilanrendah> (diakses 20 September 2018)

Witaradya,K. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik.* <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis->[implementasi-kebijakan-publik.](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/) *Diakses* tanggal 3 Oktober 2018 pukul 19:46 WIB

<http://www.rmolsumsel.com/read/2017/08/15/76990/palembang> (diakses pada 10 September 2018)

http/www.tribunnews.com ,8 Agustus 2018 (Diakses 10 Oktober 2018)

Hasil wawancara via telepon dengan Kepala Bidang dan Staf Perumahan Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang

1. Data BPS dikutip dalam laporan Sosial Ekonomi Januari 2016 [↑](#footnote-ref-1)